eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2016, 4 (4): 1301 - 1314
ISSN 2277-2623 (online),ISSN 2477-2615 (print) ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id
© Copyright 2016

PERBANDINGAN KEBIJAKAN NASIONALISASI MINYAK ANTARA CARLOS ANDRES PEREZ DAN HUGO CHAVEZ

Ghaby Istia Defila[1]
Nim. 1002045010

Abstract

The purpose of this research was to find out why the nationalization oil policy of Hugo Chavez was successful compared with the nationalization policy of Carlos Andres Perez. This was analyzed by using the concept of nationalization, the concept of economic system and the concept of multilateral cooperation. Type of research used was descriptive research. The author has used a collection of secondary data obtained from books and websites with verified sources. The results of this study indicate that the success of Chavez's nationalization was obtained, before it nationalized the Venezuelan oil industry. Chavez first examined the causes which contributed to the breakdown that occurred in the previous regime. Chavez's nationalization policy was implemented in stages; before and during the nationalization process, firstly Chavez made some internal and external policies for Venezuela that would be factors to strengthened his policies, and avoiding Perez's failures. In addition, the socialist economic system adopted by Chávez to replace Perez's capitalist economic system, succeeded in bringing Chavez to improve the Venezuelan economy to out of economic crisis and to make it easier for the Venezuelan government to take over the assets of their country from foreign parties.

Keywords: *Nationalization, Oil Industry, PDVSA, Carlos Andres Perez, Hugo Chavez*

Pendahuluan

Setiap pemimpin negara memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola sumber daya alamnya. Ini dilakukan agar dapat meningkatkan pendapatan negaranya secara maksimal guna untuk mensejahterakan rakyat di negara tersebut. Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Latin dengan penduduk berjumlah 31,8 juta orang dan semenjak tahun 1920an perekonomian Venezuela bergantung pada minyak. (http://www.kemlu.go.id/caracas/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=4&l=id).

Hampir selama lima dekade sampai tahun 1970, Venezuela adalah pengekspor minyak terbesar di dunia. Rata-rata tercatat 90% pendapatan ekspor Venezuela

[1] Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : ghabyistiadefila@gmail.com

berasal dari minyak, minyak mencakup 50% pendapatan masyarakat, dan 30% produk domestik bruto.(http://www.economicshelp.org/blog/13071/economics/venezuela-economy-and-oil-dependency/). Semenjak tahun 2010 jumlah cadangan minyak Venezuela mengalami peningkatan signifikan yaitu sebesar 296.50 bbl daripada Arab Saudi yang angkanya tidak jauh dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 264.51 bbl. Hal ini terjadi karena pada tahun 2010, survei *US Geological* telah meneliti bahwa cadangan minyak di wilayah Orinoco Belt dapat menghasilkan 513 miliar barel minyak.(http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2386#.VcdiMJ2qqkp)
Penting bagi pemimpin Venezuela untuk memegang kendali penuh negara atas pemasukan yang dihasilkan oleh minyak mengingat posisi minyak Venezuela di mata dunia. Posisi minyak Venezuela di dunia mempunyai peranan penting karena Venezuela adalah pemain *level* atas dunia di pasar minyak dan gas. Venezuela juga sebagai pelopor terbentuknya OPEC yang memiliki kedudukan penting sebagai salah satu eksportir terbesar.(Agnani, B. and A. Iza, 2005)

Meskipun Venezuela memiliki sumber daya minyak yang banyak tapi Pemerintah Venezuela tidak mampu mengelola minyaknya. Hal ini khususnya terlihat pada masa Carlos Andres Perez (1974-1979), hal ini terlihat di dalam kebijakan Nasionalisasi yang dilakukannya. Carlos Andrés Perez melakukan nasionalisasi industri minyak Venezuela pada tahun 1976 melalui pembentukan *Petroleus de Venezuela,S.A* (PDVSA) yang menjadi basis bagi kebijakan nasionalisasi industri minyaknya. Kebijakan ini malah mengakibatkan krisis ekonomi berkepanjangan di dalam negeri.

Pergantian rejim Perez oleh Luis Herrera Campins (1979-1984) tidak membawa perubahan pada Venezuela karena Campins hanya melanjutkan kebijakan rejim Perez, rendahnya harga minyak pada tahun 1980an malah memaksa Campins untuk melakukan devaluasi mata uang Bolivar lebih dari 50% mengakibatkan dollar mulai mengalir keluar Venezuela dalam jumlah milliaran. Ini menjadi awal mula pergeseran perekonomian hanya dalam beberapa tahun terakhir berhenti oleh catatan pendapatan minyak dan mengakibatkan pengurangan 4% dalam defisit anggaran pendapatan dan belanja negara. (http://www.nytimes.com/2007/11/13/world/americas/13campins.html)
Presiden selanjutnya Jaime Lusinchi (1984-1989) yang berusaha mencari solusi lain dengan meningkatkan produksi di sektor agrikultur dan memberikan subsidi bagi sektor publik tetapi dibawah control IMF namun pada akhirnya hanya meningkatkan utang luar negeri akibat menopang beban subsidi sektor publik.

Carlos Andres Perez yang kembali terpilih menjadi Presiden Venezuela (1989-1993) merubah kebijakan sebelumnya dari nasionalisasi ke privatisasi dengan menjalankan resep *Washington Concensus* dari IMF yaitu paket *Structural Adjustment Program* (SAP), kebijakan-kebijakan tersebut berakibat dibukanya kembali privatisasi industri milik Venezuela yang menyebabkan banyak perusahaan swasta asing kembali masuk dalam industri minyak Venezuela dengan mengekplorasi minyak Venezuela tetapi keuntungan mereka dibayarkan 100% ke negara asal mereka, serta penghilangan subsidi-subsidi, dan kerugian akibat devaluasi mata uang, Keadaan ini bahkan tidak terselesaikan oleh Ramon Jose Velasques (1993-1994) yang saat itu terpilih menjadi Presiden sementara Venezuela menggantikan Perez. Rafael Caldera Rodriguréz (1994-1999) yang berusaha menghapuskan neoliberalisme dibawah IMF tapi malah mengakibatkan inflasi negara sebesar 103% dan meningkatnya utang luar negeri

hingga $26,5 milyar.(http://www.americasquarterly.org/content/venezuela-ch%C3%A1vez-anatomy-economic-collapse-ricardo-hausmann-and-francisco-r-rodr%C3%ADguez)

Perubahan terjadi ketika Hugo Chavez (1999-2013) terpilih menjadi Presiden Venezuela menggantikan Rodriguréz. Hugo Chavez kembali memberlakukan kebijakan Nasionalisasi pada perusahaan induk minyak Venezuela yaitu PDVSA yang dulu menjadi kebijakan Carlos Andres Perez. Nasionalisasi Chavez justru berhasil dan mengeluarkan Venezuela dari krisis ekonomi. Kebijakan Nasionalisasi menjadi kesuksesan besar Hugo Chavez dalam mengelola industri minyak di Venezuela. Venezuela memperoleh keuntungan bersih sebesar 60%. Pemerintah Venezuela menguasai sedikitnya 60% saham yang dahulunya hanya 40% dari semua perusahaan minyak yang dahulu dikuasai pihak asing. Dengan keberhasilan ini Venezuela dapat bangkit dari krisis karena meningkatnya penghasilan negara pada sektor minyak.(http://www.americasquarterly.org/content/venezuela-ch%C3%A1vez-anatomy-economic-collapse-ricardo-hausmann-and-francisco-r-rodr%C3%ADguez)
Kebijakan Nasionalisasi ini berbanding terbalik hasilnya dengan apa yang didapatkan pada rejim Perez.

Kerangka Teori Dasar

Konsep Nasionalisasi

Nasionalisasi sering disamakan dengan konfikasi dan onteigening dan pencabutan hak. Istilah nasionalisasi paling tidak mencakup tiga pengertian "Konfiskasi", "*Onteigening*" dan "Pencabutan Hak". Menurut Dieter Nohlen dalam bukunya Kamus Dunia Ketiga, Nasionalisasi dipahami sebagai pengambilan alat produksi dan sumber daya yang berada di tangan swasta asing oleh aparatus nasional. Nasionalisasi bertopang pada tindakan negara, dapat dirundingkan dan dapat juga dilakukan secara revolusioner.(Dieter Nohlen, 1994)
Nasionalisasi dapat berarti perubahan atau asumsi control atau kepemilikan dari kepemilikan swasta ke negara.
Ada beberapa alasan mengapa nasionalisasi dilakukan, dikutip dari buku Hukum dan Hubungan Internasional, oleh M. Burhan Tsani, yaitu :

1. Nasionalisasi adalah untuk memenuhi dana negara guna melangsungkan aktifitas kesejahteraan sosial yang disebabkan tidak adanya penghasilan negara yang memadai.
2. Kebijakan negara menghendaki dilakukan nasionalisasi.
3. Perusahaan asing dianggap hanya merupakan pengaliran devisa kenegara asing, dan reatriasi keuntungan kenegaranya.
4. Kecurangan terhadap aktifitas bisnis dan menggunakan hal itu sebagai pijakan. Negara penjajah dalam menguasai jajahan, perusahaan asing, perusahaan multinasional.
5. Nasionalisme sebagai uapaya untuk menghasilkan pemerintahan yang kolonial, sebagai perusahaan asing merupakan wujud terakhir kolonialisme.

Mengetahui masalah represi ide dan teror psikologis maupun teror nyata yang dijalankan oleh sistem kapitalisme global membuat Carlos Andres Perez dan Hugo Chavez memberanikan diri menjadi pionner jalan pembangunan alternatif melawan arus status-quo neoliberalisme dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan

minyak terbesar Venezuela PDSVA, walaupun hal itu secara sadar akan menemukan banyak tantangan domestik dan internasional nantinya.

Konsep Sistem Ekonomi

Secara teoritis, pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan–aturan atau cara–cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sedangkan menurut Gilarso sistem ekonomi adalah keseluruhan cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagaiannya) dalam menjaankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagaiannya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.(Gilarso, 1992)

Kelangsungan hidup suatu negara tentunya juga sangat tergantung dari adanya kegiatan perekonomian yang berlangsung di negara tersebut. Kelancaran suatu kegiatan perekonomian juga tentunya didukung dengan adanya sistem ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara.

Ada 3 macam sistem ekonomi yang berdasarkan kepemilikan aset (Grossman,1967):

1. Sistem Ekonomi Sosialis
   Sistem ekonomi sosialis dikenal juga dengan sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana pemerintah memegang peranan paling penting atau dominan dalam pengaturan kegiatan ekonomi. Dominasi yang dilakukan pemerintah itu dapat berupa pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi ini antara lain, China, Rusia, serta beberapa negara di Eropa Timur yang merupakan bekas jajahan Rusia.
2. Sistem Ekonomi Kapitalis
   Sistem ekonomi kapitalis dikenal juga sebagai sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Kondisi ini benar-benar tidak memerlukan campur tangan pemerintah atau dengan kata lain, pemerintah akan benar-benar lepas tangan terhadap pengambilan keputusan ekonomi.
3. Sistem ekonomi Campuran
   Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Perpaduan ini mengambil garis tengah antara kebebasan dan pengendalian. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk berusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, tetapi di sisi lain pemerintah juga ikut campur tangan dalam kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk menghindari penguasaan secara penuh dari segolongan masyarakat terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam kasus ini walaupun Carlos Andres Perez dan Hugo Chavez memiliki kebijakan yang sama dalam mengelola industri minyak Venezuela dengan menasionalisasikannya tetapi sistem ekonomi yang mereka terapkan di Venezeula

berbeda yaitu Carlos Andres Perez menggunakan sistem ekonomi kapitalis sedangkan Hugo Chavez menggunakan sistem ekonomi sosialis.

Konsep Kerjasama Multilateral

Menurut Miles Kohler multilateral didefinisikan sebagai salah satu dari sekian banyak pemerintahan Internasional, yang prinsip utamanya adalah lawan dari bilateral dan perjanjian yang bersifat diskriminatif yang diyakini akan meningkatkan kemampuan yang kuat diatas yang lemah dan meningkatkan konflik Internasional.(Kahler Miles, 1992)

Terdapat beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama multilateral dengan negara lainnya (Holsti K.J, 1995) :

1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.
2. Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.
4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Pemerintahan Hugo Chavez menempuh kebijakan internasionalnya dalam kerjasama multilateral dengan melakukan langkah-langkah berani dan sangat berbeda dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Kebijakan internasional yang ditempuhnya tetap berprinsip kepada anti neoliberalisme dan anti kapitalisme. Untuk tidak mengulangin kegagalan Carlos Andres Perez dalam mengelola industri minyak di Venezuela, maka Hugo Chavez harus memiliki kebijakan-kebijakan lain selain kebijakan *intern* dalam negara, tapi juga harus memiliki kebijakan *extern* yang dapat memperkuat kebijakannya dalam re-nasionalisai minyak Venezuela sehingga tantangan domestik serta internasional yang datang tidak akan mempengaruhi, serta kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi faktor keberhasilan Hugo Chavez dalam mengelola industri minyak di Venezuela.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan library research. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode ilustratif yaitu metode yang mengaplikasikan teori pada kondisi faktual. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Ekonomi Politik Venezuela Rejim Carlos Andres Perez

Masalah yang paling penting harus dihadapi Perez pada masa Kepresidenan pertamanya (1974-1979) adalah produksi minyak Venezuela dan kepemilikan asing yang menyulitkan pemerintah mendapatkan hasil besar dalam investasi di sektor minyak. Salah satu aspek paling radikal dalam program pemerintah Perez adalah

anggapan bahwa minyak bumi menjadi alat untuk negara-negara yang kurang berkembang seperti Venezuela agar memiliki *Value* di mata dunia dan mengantarkan Venezuela ke tatanan internasional yang lebih adil. Kebijakan embargo minyak oleh negara-negara Timur Tengah pada tahun 1973 membuat Venezuela berhasil meningkatkan pendapatan minyaknya secara signifikan pada tahun 1974. Kenaikan pendapatan yang drastis dan cepat ini memberi kesempatan kepada Carlos Andrés Perez untuk menjalankan kebijakan produksi minyak sebanyak mungkin demi meraih peningkatan pendapatan secara maksimal dan mempercepat terjadinya nasionalisasi industri minyak di Venezuela melalui pembentukan PSDVA di tahun 1976. Namun hasil Nasionalisasinya gagal. Pada masa kepresidenan pertamanya Perez menghasilkan inflasi sekitar 80%, pengangguran mencapai 14%, kemiskinan juga meningkat hingga 65% dan jumlah penduduk dalam taraf miskin ini meningkat 85%. Penurunan upah rill sebesar 40% juga menyebabkan kemerosotan ketersediaan tenaga kerja di bidang pertanian sebesar 90%. Semenjak masa ini Venezuela bergabung dalam program neoliberal yang disponsori oleh IMF dan Bank Dunia untuk dapat keluar dari krisis ekonomi. (Daniel J.Seyker, 2011)

Selanjutnya, kekuasaan Perez jatuh akibat buruknya kepemimpinannya dan digantikan oleh Luis Harrera Campins (1979-1984). Presiden Luis mengambil momentum harga minyak yang kembali membaik pada tahun 1980. Situasi ekonomi semakin memburuk saat harga minyak menurun lagi pada tahun 1981 dan membuat Venezuela memiliki hutang sebesar US$3 miliar dollar menjelang tahun 1983. Pemerintah mengalokasikan miliaran dollar cadangannya di PDVSA untuk membayar hutang. Akan tetapi, tindakan pemerintahan tersebut direspon serikat pekerja dengan melakukan berbagai macam pemogokan sepanjang pertengahan tahun 1980-an, yang mengakibatkan kondisi perekonomian Venezuela pada tahun 1983 berada dalam keadaan kacau dan menyebabkan kemiskinan rakyat menjadi berlanjut.(http://www.nytimes.com/2007/11/13/world/americas/13campins.html)

Presiden Jaime Lusinchi (1984 -1989) muncul untuk mencoba mengatasi krisis yang terjadi, dengan mendevaluasikan nilai mata uang, pengetatan proteksi impor, dan program ketahanan pangan meningkatkan produksi di sektor agrikultur meningkatkan produksi di sektor agrikultur serta memberikan subsidi bagi sektor publik di bawah kontrol IMF, dan memberikan subsidi bagi sektor publik di bawah kontrol IMF. Namun, pertumbuhan ini tidak cukup cepat untuk menopang beban subsidi sektor publik dan lonjakan hutang luar negeri. Hal itu diperparah karena turunnya harga minyak dunia hingga 5% pada tahun 1986.

Pada Masa Kepresidenan Perez yang kedua (1989-1993) Kondisi perekonomian negara pun belum mengalami pemulihan. Pada bulan februari 1989, pada awal masa jabatan kedua Perez sebagai Presiden, dia menerima sebuah proposal dari IMF yang dikenal sebagai *Washington Concencus*. IMF menawarkan Venezuela pinjaman sebesar 4,5 miliar dolar AS. Perez mengimplementasikan program penyelamatan ekonomi dari IMF dengan dengan mengumumkan restruksi ekonomi dengan membawa Venezuela pada sistem pasar bebas dan memberi jalan bagi masuknya dominasi asing melalui *foreign direct investment* (FDI) terhadap sektor-sektor ekonomi strategis Venezuela, termasuk minyak. Ia mengeluarkan kebijakan suku bunga mengambang, kenaikan pajak di sektor pelayanan publik, kenaikan upah hanya

sebesar 5%, penghapusan tarif impor secara progresif, pengurangan 4% dalam defisit anggaran dan pendapatan negara, pelemahan buruh melalui sistem ikatan kerja yang fleksibel, pencabutan subsidi pupuk, liberalisasi perdagangan melalui penurunan tarif pajak asing, serta pengetatan belanja publik dengan pemotongan subsisdi dan privatisasi sejumlah besar perusahaan negara.(http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-04332011000200005&script=sci_arttext)

Pada tanggal 16 Februari 1989 Perez melakukan kesepakatan terhadap IMF melalui *Structural Adjusment Program* (SAP). Kesepakatan ini menghasilkan gagasan-gagasan neoliberal sebagaimana dipraktekkan di Inggris dan AS serta yang diadopsi di negara Venezuela dalam sejumlah kebijakan lembaga ekonomi internasional tersebut dikemas oleh John Williamson (1993) sebagai *Washington Consensus.*

Akibat kebijakan-kebijakan tersebut yang diimplementasikan oleh Perez, inflasi mencapai 80,7%, upah riil menurun hingga 40%, pengangguran mencapai 14%, angka kemiskinan meningkat dari 43,9% pada tahun 1988 menjadi 66,5% pada tahun 1989, dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan meningkat hingga 84%. Dalam kurun waktu tiga tahun masa kekuasaan Perez, sekitar 600 ribu penduduk pindah ke kota-kota dan mengakibatkan jumlah tenaga kerja sektor pertanian merosot sampai 90%.(Rorry Carol, 2013)
Presiden selanjutnya Ramon Jose Velasques (1993-1994) yang hanya terpilih menjadi Presiden sementara Venezuela menggantikan Perez dengan masa jabatannya yang singka tersebut, ia jelas tidak bisa memberikan perubahan bagi Venezuela. Setelah itu Rafael Caldera (1994-1999) berusaha menentang keras kebijakan neoliberalisme Perez dan mengutuk korupsi yang terjadi di pemerintahan Venezuela, tetapi karena lemahnya posisi tawar menawar mengenai harga minyak Venezuela dan di tengah hantaman krisis yang amat parah pada juli 1996 memaksa Caldera melakukan negoisasi persetujuan penyesuaian struktural dengan IMF. Kesepakatan yang ia lakukan dengan IMF mengakibatkan diterimanya kembali program-program neoliberal, yang berdampak pada inflasi sebesar 103% , meningkatnya utang luar negeri sebesar US$26,5 miliar.

Ekonomi Politik Venezuela Rejim Hugo Chavez

Melihat permasalahan kondisi Venezuela yang dirasakan tidak mengalami perubahan dan malah merugikan rakyat. Kritisme terhadap privatisasi besar-besaran industri minyak dan menjadikan perang melawan korupsi baik pada level pemerintahan sipil maupun di dalam tubuh militer adalah hal-hal yang menjadi slogan utama Chavez dalam kampanyenya. Pada tanggal 6 Desember 1998, Chavez terpilih dalam pemilu dengan perolehan sebesar 56% dari 3.673.685 suara. Setelah resmi terpilih, Chavez memperkenalkan Revolusi Bolivarian dimana Revolusi ini telah di canangkannya dari tahun 1992. Sebuah revolusi konstitusi yang menambahkan hak-hak kaum terpinggir dan mengubah struktur pemerintah Venezuela. Kemenangan Chavez menandai awal dilakukaknya perubahan secara radikal yang bertujuan memulihkan krisis ekonomi negara dan perubahan arah politik Venezuela.

Hugo Chavez memperkenalkan jaminan sosial untuk rakyat miskin, dan melancarkan gerakan yang diberi nama *Mission Guaicaipuro* yang bertujuan untuk melindungi kehidupan, agama, tanah, adat, dan hak-hak asasi penduduk, yang kebanyakan terdiri

dari suku Indian. Gerakan-gerakan lainnya diberi nama *Mission Robinson* (untuk pemberantasan buta huruf bagi 1,5 juta orang dewasa), *Mission Sucre* (agar kaum muda dapat melanjutkan sekolah), *Mission Ribas* (untuk jutaan anak-anak yang putus sekolah), dan *Mission Barrio Adentro* (untuk mendirikan dana memperlengkapi rumah sakit dan klinik). Pemerintah Venezuela juga menjalankan program sosial-ekonomi yang diberi nama *Mercal*, yang memungkinkan sebanyak 500 ribu penduduk Venezuela membeli bahan makanan dan minuman – yang disubsidi – dengan potongan harga 50% di 14 ribu toko *Mercal* di seluruh negeri. Bahan makanan dan minuman ini mendapat subsidi dari negara. (Lutfi Anggara, 2007)
Sejak kepemimpinan Hugo Chavez, Venezuela merubah sistem ekonomi negaranya menjadi sosialis. Dengan menganut sosialisme kerakyatan atas inspirasi dari tokoh yang disukainya yakni Simon Bolivar, Hugo Chavez membangun ulang Venezuela dengan program *21st Century Socialism* melalui Revolusi Bolivariannya. (Michael A, Lebowitz, 2009)

Dinasionalisasikannya perusahaan minyak PDVSA pada tahun 2001 adalah jawaban dari kritik Hugo Chavez pada masa kampanyenya atas privatisasi besar-besaran pada industri minyak yang dilakukan pemerintah sebelumnya. PDVSA awalnya dikuasai oleh pihak konglomerat swasta. Nasionalisasi minyak ini dianggap sangat penting untuk menopang perekonomian Venezuela, dimana hasil dari perusahaan minyak ini dulunya hanya mengalir dia kalangan konglomerat dan pihak-pihak elit yang berkuasa sedangkan rakyar Venezuela hanya bisa menikmati sedikit saja penghasilan dari perusahaan minyak ini. Nasionalisasi yang dilakukan Chavez dalam bentuk pengambil alihan perusahaan-perusahan minyak asing di Venezuela dengan cara menguasai saham mayoritas dari mereka secara berkelanjutan sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan perusahaan asing tersebut. Chavez dikatakan berhasil dalam kebijakan Nasionalisasinya.

Pada tanggal 30 April 2007 dibawah Hugo Chavez, Venezuela memutuskan keluar dari dua lembaga Internasional yaitu IMF dan Bank Dunia ini dikarenakan seiring dengan meningkatnya devisa negara akibat meningkatnya harga minyak dunia, Chavez segera membayar kembali semua hutang Venezuela pada IMF dan Bank Dunia. Chavez telah melunasi seluruh hutang Venezuela kepada IMF pada tahun 1999 kemudian dilanjutkan melunasi seluruh hutang pada Bank Dunia pada tahun 2007.

Selain itu pada tanggal 1 Januari 2008, Chavez berhasil mengkonsolidasi semua partai politik pendukungnya yang awalnya terpecah belah dalam berbagai partai politik disatukan dalam sebuah partai yang diberi nama Partai Persatuan Sosialis Venezuela (PSUV). Keputusan ini membuat Chavez dinilai sebagai diktaktor yang memerintah secara otoriter di sebuah negara demokrasi, karena dengan hanya adanya satu partai Chavez lebih mudah mengontrol negaranya dan menyatukan suara dalam mengambil kebijakan.

Selama Hugo Chavez menjabat sebagai Presiden Venezuela, dia dapat dikatakan sukses membangun Venezuela dari keterpurukan, bahkan ditengah kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan. Sejak tahun 1999-2013 dalam masa kepemimpinannya, Chavez telah menghasilkan beberapa rencana yang dapat digagas

bahkan diterapkan dengan baik di Venezuela yang berdampak pada membaiknya perekonomian Venezuela.

Di masa tahun kepemimpinan Chavez dari tahun 1999-2013 angka inflasi di Venezuela terletak di titik terendah daripada masa periode rejim-rejim sebelumnya, bukan hanya itu pendapatan minyak terus mengalami peningkatan khususnya ditahun 2010-2012. Ini adalah salah satu bukti kesuksesan Hugo Chavez dalam memimpin.

Dengan sistem ekonomi sosialis yang dianut Chavez, Pemerintah Venezuela dapat dengan mudah mengambil alih aset negara dari pihak asing karena peran negara akan lebih besar untuk mensejahterakan rakyatnya dan negara tidak melayani kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional. Sistem ini kemudian mempengaruhui kebijakan dalam dan luar negeri Venezuela.

Nasionalisasi Industri Minyak Venezuela Rejim Carlos Andres Perez

Pada tahun 1976, Pérez melakukan nasionalisasi terhadap industri minyak melalui pembentukan *Petroleros de Venezuela S.A* (PDVSA) dan membeli perusahaan asing seharga US$1 miliar. Hingga sekarang PDVSA menjadi perusahaan minyak terbesar di Venezuela. PDVSA berfungsi sebagai sebuah *holding company* yang menjadi induk bagi empat perusahaan besar yang menjadi cabang/afiliasinya. Empat afiliasi besar itu dibentuk dari penggabungan empat belas perusahaan asing yang sudah beroperasi di Venezuela dan dan satu perusahaan negara yang sudah ada, yaitu CVP.

Proses nasionalisasi dibawah Perez terkesan tegesa-gesa tanpa ada persiapan yang dapat menjamin nasionalisasi tersebut akan terus berjalan lancar, karena Perez hanya memanfaatkan momen dimana harga minyak saat itu sedang tinggi sehingga berpikiran dengan menasionalisasi industri minyak, maka Venezuela akan memperoleh keuntungan maksimal tanpa harus membaginya dengan pihak asing. Perez tidak membuat kebijakan yang akan memperkuat nasionalisasi dan sebagai pencegah kegagalan yang bisa terjadi setelah menutup privatisasi industri minyak Venezuela. Walaupun dana investasi telah disiapkan untuk proses pengambilan alih industri minyak Venezuela, tetapi Perez tidak pernah berpikir untuk melunasi utang luar negeri Venezuela, yang meningkat dari $0,7 miliar pada tahun 1974 menjadi $6,1 miliar pada tahun 1978, atau berusaha menghentikan arus modal $35 miliar di seluruh negeri. Serta Perez tidak pernah mengira bahwa harga minyak tidak selalu stabil karena sewaktu-waktu bisa turun.

Keadaan memburuk mulai terlihat ketika pada tahun 1978 Amerika Serikat sebagai negara importir terbesar Minyak Venezuela memutuskan untuk mengurangi jumlah impor minyaknya menjadi hanya 181.000barel/hari dimana sebelumnya mencapai 250.000barel/hari.
(http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=MCRIMUSVE2&f=A)
Hal ini disebabkan stagflasi yang terjadi di Amerika Serikat akibat tingginya biaya yang dikeluarkan pada Perang Vietnam 1975 sehingga harus melakukan penghematan anggaran negara. Faktor lainnya adalah menurunnya tingkat kosumsi minyak negara importir sampai 13% di negara Amerika Serikat, Eropa dan Jepang sebagai reaksi terhadap kenaikan harga minyak yang diterapkan oleh OPEC pada tahun 1973.

Kondisi ini membuat jatuhnya harga minyak Venezuela sejak 1978, yang berdampak tingginya defisit negara dan menurunnya pendapatan per kapita Venezuela. Akibatnya pengeluaran negara menjadi tidak terkendali, terjadinya *capital flight.*

Di 5 tahun masa jabatan pertamanya, Pérez telah menghabiskan banyak uang dan memperburuk keadaan negara. Selain dampak buruk internal yang dialami Venezuela, produksi besar-besaran yang dilakukan Pérez dari tahun 1974 juga menjadi salah satu penyebab terjadinya *Oil Glut* di tahun 1980 yang berdampak negatif bagi negara produsen minyak lainnya sehingga pendapatan negara mereka yang bergantung pada penjualan minyak drastis menurun, selain itu anjloknya harga minyak pada saat itu berdampak pada melemahnya nilai tukar mata uang, meningkatnya inflasi serta memperlambat pertumbuhan ekonomi. (U.S News & World Report, 1990)

Dalam kebijakan eksternal Perez selama menasionalisasikan industri minyak Venezuela. Perez menggunakan kekayaan minyak untuk memperbesar profilnya dalam urusan regional dan internasional. Sejak awal 1970-an, pendapatan minyak yang besar tidak dapat diinvestasikan secara langsung di negara, terutama karena takut menciptakan ekonomi inflasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pada Juni 1974 Carlos Andres Perez membentuk *Bank Fondo de Inversiones de Venezuela* (FIV) sebuah bank Dana Investasi Venezuela. Tetapi karena pengelolaan manajemen tidak baik dan korupsi tinggi didalamnya Bank ini tidak berkerja seperti seharusnya, malah Bank ini menjadi media untuk World Bank dalam menyalurkan bantuan keuangan dengan syarat-syarat yang telah diberikan IMF pada saat Perez tidak dapat menaggulangi krisis ekonomi yang terjadi di negaranya.

Nasionalisasi Industri Minyak Venezuela Rejim Hugo Chavez

Masalah minyak menandai keberhasilan ekonomi dan merupakan penyebab pertentangan antara rakyat biasa dengan kalangan konglomerat swasta yang menguasai perusahaan minyak di Venezuela yang kemudian memunculkan gerakan revolusioner Bolavarian dan krisis ekonomi berkepanjangan di Venezuela. Penting bagi Chavez untuk memegang kendali penuh negara atas pemasukan yang dihasilkan oleh minyak mengingat posisi minyak Venezuela di mata dunia. Hal ini sangat tepat dipandang dari sudut pandang kaum realis dimana negara harus mengontrol pasar. Kegagalan-Kegalan Presiden Venezuela sebelumnya dalam mengelola industri minyak di Venezuela menjadi dasar Hugo Chavez merubah kebijakan-kebijakan yang telah di buat sebelumnya pasca terpilihnya dia menjadi Presiden Venezuela pada Febuari 1999.

Menurut Chavez PDVSA harus dinasionalisasi sebab PDVSA merupakan perusahaan terbesar negara dan paling banyak memperkerjakan buruh. Nasionalisasi PDVSA dilakukan dengan negosiasi kembali yang memberikan keuntungan bagi negara dan juga pihak asing, meskipun porsi kepemilikan negara menjadi lebih besar yaitu mencapai 60% yang sebelumnya hanya sebesar 30-40%. Sebelum memutuskan untuk menasionalisasikan kembali PDVSA Chavez terlebih dahulu melakukan penyelidikan atas penyimpangan pengelolaan industri minyak di Venezuela. Hasil penyelidikan memaparkan fakta bahwa pengelolaan migas sangat merugikan negara dan hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan multinasional. Kerugian tersebut diantaranya

adalah lepasnya kontrol negara atas migas, hilangnya peran negara dalam menetapkan harga, dan penilaian atas royalti serta pajak pendapatan, dan hilangnya potensi pemasukan bagi negara dengan adanya privatisasi.

Namun berangkat dari kegagalan yang dilakukan Carlos Andres Perez terhadap nasionalisasi minyak di Venezuela. Nasionalisasi oleh Chavez dilakukan tidak terburu-buru. Hugo Chavez baru mulai mengeluarkan kebijakan nasionalisasi secara bertahap di mulai dari Desember 2001 hingga 2 Juli 2010 walaupun ia telah menduduki kekuasaan sejak tahun 1999. Kebijakan nasionalisasi secara bertahap ini dilakukan karena sebelum dan selama mengeluarkan kebijakan Nasionalisasi, Chavez terlebih dahulu membuat beberapa kebijakan internal dan eksternal untuk Venezuela yang dimaksudkan akan menjadi faktor penguat kebijakan Nasionalisasi yang dijalankan Chavez.

Reformasi sistem keuangan negara pada 1999 oleh Chavez berguna untuk menghindari dampak buruk dari devaluasi mata uang seperti tingginya inflasi yang sewaktu-waktu dapat terjadi seperti pada rejim Perez, selain itu CADIVI yang dibentuk sebagai alat administratif pasar memiliki tujuan yang salah satu nya sektor industri minyak mendapat jaminan untuk memiliki dana dalam menjalankan produksi. Hal ini tidak dilakukan pada zaman Perez sebab Perez menggunakan dana anggaran negara untuk membiyai dana produksi di PDVSA.

Pada 14 November 2001 Chavez melakukan pembaharuan ekonomi yang membuat Chavez dapat merubah undang-undang penanaman modal di Venezuela, yang kemudian diberlakukannya pajak yang tinggi terhadap penanaman modal di Venezuela, dimana setiap perusahaan yang berinvestasi di Venezuela harus membayar pajak sebesar 30% kepada negara.

Didirikannya dana pembangunan nasional (FONDEN) pada September 2005 sebagai langkah penting strategis menuju kedaulatan yang berfungsi untuk mengatur pendapatan dari surplus minyak yang sejak dulu, merupakan basis penting bagi penentuan cadangan mata uang asing negeri ini. Bersama transfer cadangan surplus devisa, mekanisme tersebut menyebabkan Venezuela tidak perlu meminta jalan keluar pada lembaga Internasional seperti IMF.

Keputusan Chavez untuk mengubah sistem multi partai di Venezuela menjadi hanya uni partai ini dimaksudkan agar tidak banyak pihak berkepentingan dan menikmati hasil dari pengeloalaan kekayaan minyak Venezuela tanpa memikirkan nasib rakyat. Sebelumnya semenjak tahun 1976 Pemerintah Venezuela lah yang banyak menikmati keuntungan dari industri minyak PDVSA hingga 71% dari pendapatnnya sehingga menyebabkan tingginya korupsi, tetapi pada masa Chavez pemerintah hanya mendapat 36% dari keuntungan minyak yang dihasilkan PDVSA dan sisa 64% dikelola sendiri oleh PDVSA.

Kebijakan-kebijakan internal tersebut memberikan hasil baik pada Venezuela. Ekonomi Venezuela meningkat secara signifikan. Hingga tahun 2006, pertumbuhan ekonomi Venezuela mencapai lebih dari 9%. Pertumbuhan terkuat justru berada di sektor non minyak, terutama jasa konstruksi. Didalamnya meliputi proyek

pembangunan masyarakat yang berupa pembangunan rumah-rumah untuk rakyat. Pada tahun 2005, Venezuela menjadi negara dengan tingkat GDP *(Gross Domestic Product*) atau jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun yang merupakan tertinggi di Amerika Latin karena pertumbuhan ekonominya sebesar 9,3%.(https://www.voanews.com/a/venezuela-looks-to-hugo-chavez-oil-belt-to-fix-economy/2705406.html)

Tujuan dibentuknya ALBA pada Desember 2001 adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam tingkat pembangunan negara-negara dan sektor-sektor produktif serta menentukan mekanisme yang tepat bagi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. membangun masa depan Amerika Latin yang sejahtera, menghancurkan ketidaksetaraan sosial *(abhorrent social inequalities)* dan menjadikan wilayah ini sebagai kekuatan yang mampu menjalankan model perekonomian sendiri di tengah globalisasi, melauli strategi ekonomi, politik, sosial-budaya yang ada di kawasan Amerika Latin. Negara-negara anggota ALBA adalah Antigua dan Barbuda, Bolivia, Kuba, Dominika, Ekuador, Honduras, Nikaragua, Saint Vincent dan Grenada, dan Venezuela.

Kemudian untuk mewujudkan tujuan dari ALBA dibentuknya Bank Selatan *(Banco Del Sur)* sebagai lembaga untuk mendistribusikan bantuan keuangan yang telah disepakati ALBA kemana tujuan dari bantuan tersebut, Bank Selatan didirikan dengan tujuan yang amat politis yakni membendung pengaruh kapitalisme yang dibawa IMF dan Bank Dunia dalam setiap program dan bantuan keuangannya. Sedangkan IMF dan Bank Dunia identik dengan strategi liberalisasi dan privatisasi.

Dalam rangka membebaskan Venezuela dari penindasan mekanisme keuangan kapitalis (IMF, WTO, dan Bank Dunia), Presiden Chávez dan pemerintahannya telah merancang sebuah kelompok aliansi-aliansi strategis bersama (negeri-negeri) yang ekonominya sedang berkembang maju, seperti Brazil, Rusia, India, China, Iran dan Belarusia. Di bidang politik, Venezuela bersama Kuba dan Bolivia menyatakan diri sebagai *Axis of God* dengan tujuan menentang klaim Amerika Serikat atas Kuba, Libya, Iran, dan Syria sebagai *Axis of Evil*.

Hal ini membuktikan walaupun Hugo Chavez sangat anti pada sistem neoliberalisme terutama campur tangan asing yang terus merugikan negaranya, bahkan dia memutuskan membawa Venezuela keluar dari dua lembaga Internasional yaitu Bank Dunia dan IMF, tetapi Hugo Chavez menyadari bahwa dia membutuhkan kerjasama dengan negara lain yang bisa membantu Venezuela tidak terpengaruh terhadap faktor-faktor eksternal yang bisa mengganggu stabilitas internal negara. Pembentukan ALBA dan Bank Selatan juga dimaksudkan sebagai pencegahan Venezuela untuk kembali bergabung dengan Bank Dunia dan IMF apabila suatu saat industri minyak Venezuela mengalami *collapse* dan kembali menimbulkan krisis ekonomi di dalam negara seperti yang terjadi di rejim Perez. Buruknya sistem dan persyaratan merugikan yang diberlakukan Bank Dunia dan IMF kepada negara yang membutuhkan bantuan mereka, membuat Hugo Chavez membangun ALBA dan Bank Selatan berdasarkan solidaritas dan tanpa syarat apapun.

Seperti yang kita ketahui tidak ada negara yang bisa efektif mengurus negaranya sendiri terutama dalam menyelesaikan masalah eksternal negara tidak peduli sekuat apapun negara tersebut. Untuk itu sebuah negara membutuhkan kerjasama dengan negara lain, karena dari sekian banyak isu-isu global yang telah ditangan dengan baik melalui kerjasama multilateral, banyak dari isu-isu global yang bersifat secara alami yang tindakan penyelesaiannya dilakukan atau tidak dilakukan oleh semua negara akan mempengaruhi kesejahteraan semua negara, dan tidak ada negara yang mampu mengatasi masalah itu sendiri.

Kesimpulan

Keberhasilan Nasionalisasi Chavez didapatkan karena sebelum menasionalisasikan industri minyak Venezuela, Chavez terlebih dahulu mempelajari penyebab kegagalan yang terjadi di rejim sebelumnya. Kebijakan nasionalisasi Chavez dilakukan secara bertahap karena sebelum dan selama mengeluarkan kebijakan Nasionalisasi, Chavez terlebih dahulu membuat beberapa kebijakan internal dan eksternal untuk Venezuela yang dimaksudkan akan menjadi faktor penguat kebijakan Nasionalisasi yang dijalankan Chavez dan antisipasi atas kegagalan pada kebijakan nasionalisasi di masa Perez. Selain itu, sistem ekonomi sosialis yang dianut Chavez menggantikan sistem ekonomi Kapitalis yang dianut Perez, berhasil membawa Chavez memperbaiki ekonomi Venezuela sehingga keluar dari krisis ekonomi serta mempermudah Pemerintah Venezuela mengambil alih aset negara mereka dari pihak asing karena prinsip yang jelas dari Sosialis bahwa peran negara akan lebih besar untuk mensejahterakan rakyatnya dan negara tidak melayani kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional.

Daftar Pustaka

Buku

Bruce, Ian. (2008). *The Real Venezuela Making Socialism in the Twenty-first Century*. London: Pluto Press.

Hallinger, Daniel . *Political Overview: The Breakdown of Puntofijismo and The Rise of Chavismo.*

Soyomukti, Nurani, 2007, *Revolusi Bolivarian Hugo Chavez dan Politik Radikal*, Yogyakarta: Resist Book.

Internet

"Chavez Mengumumkan Kebijakan Radikal Melawan Kapitalisme di Venezuela" yang terdapat dalam https://www.marxist.com/chavez-radikal-melawan-kapitalisme-venezuela.htm diakses pada tanggal 2 April 2016

"*Embattled Venezuela Can Still Count on International Lifelines, From Russia to China"* yang terdapat dalam http://www.worldpoliticsreview.com/articles/20895/embattled-venezuela-can-still-count-on-international-lifelines-from-russia-to-china diakses pada tanggal 7 Juli 2016

"Luis Herrera Campin, Venezuela Leader" yang terdapat dalam http://www.nytimes.com/2007/11/13/world/americas/13campins.html diakses pada tanggal 27 April 2017

"Profil Negara dan kerjasama" yang terdapat dalam http://www.kemlu.go.id/caracas/Pages/CountryProfile.aspx?IDP=4&l=id diakses pada tanggal 3 April 2016

"Venezuela before Chavez:Anatomy of Economic Collapse by Richardo Hausman and Fransisco R.Rodrigures" yang terdapat dalam http://www.americasquarterly.org/content/venezuela-ch%C3%A1vez-anatomy-economic-collapse-ricardo-hausmann-and-francisco-r-rodr%C3%ADguez diakses pada tanggal 5 September 2014

"Venezuela oil and dependency" yang terdapat dalam http://www.economicshelp.org/blog/13071/economics/venezuela-economy-and-oil-dependency/ diakses tanggal 31 Oktober 2016

"Venezuela's new role in World Affairs" yang terdapat dalam http://www.jstor.org/discover/10.2307/40394940?uid=2&uid=4&sid=21103964499043 diakses pada tanggal 3 April 2014

"Venezuela : Oil reserves surpasses Saudi Arabia's" yang terdapat dalam http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/14/4060/Business/Markets--Companies/Venezuela-Oil-reserves-surpasses-Saudi-Arabias.aspx diakses pada tanggal 4 Agustus 2015